INDEKS KUALITAS HIDUP MANUSIA

Kabupaten Luwu Timur

2017

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

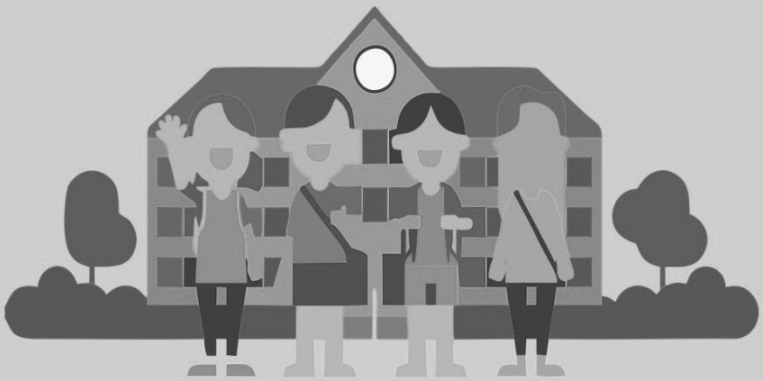

INDEKS KUALITAS HIDUP MANUSIA

Kabupaten Luwu Timur

2017

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita sehingga publikasi yang berjudul "Indikator Kualitas Hidup Manusia Kabupaten Luwu Timur 2017" dapat diselesaikan dengan baik.

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Peran para pelaku pembangunan kemudian adalah bagaimana menerjemahkan hakikat tersebut dan menjabarkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tentu saja, instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia itu telah berjalan juga menjadi faktor penting didalamnya.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk menyusun Indikator Kualitas Hidup Manusia Kabupaten Luwu Timur sebagai sumber informasi penting yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan terkait pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur secara berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah maupun masyarakat luas dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi pedoman dalam mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang sifatnya kostruktif sangat kami harapkan guna perbaikan publikasi dimasa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna data.

Malili, November 2018
BAPELITBANGDA
KABUPATEN LUWU TIMUR
K e p a l a,

Drs. H. Muh. Abrinsyah, MM
NIP. 19661005 198603 1 012

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iv
DAFTAR GAMBAR			vi
BAB 1	**PENDAHULUAN**		
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Maksud dan Tujuan Penulisan	2
	1.3	Manfaat dan Kegunaan	2
	1.4	Fungsi, Lingkup dan Keterbatasan	3
	1.5	Sistematika Penulisan	4
BAB 2	**METODOLOGI**		
	2.1	Perkembangan Metodologi IPM	5
	2.2	Sumber Data	5
	2.3	Penyempurnaan Metodologi IPM Tahun 2014	5
	2.4	Komponen IPM	7
		2.4.1 Umur Panjang dan Sehat	7
		2.4.2 Pengetahuan	8
		2.4.3 Hidup Layak	8
		2.4.4. Dimensi, Indikator, dan Indeks Pembentuk IPM	9
	2.5	Teknik Penghitungan IPM dengan Metode Baru	10
		2.5.1 Angka Harapan Hidup	10
		2.5.2 Harapan Lama Sekolah	11
		2.5.3 Rata-Rata Lama Sekolah	12
		2.5.4 Purchasing Power Parity (PPP)	14
	2.6	Kecepatan Perubahan IPM	17
	2.7	Klasifikasi/tingkatan Status IPM	18
BAB 3	**GAMBARAN UMUM**		
	3.1	Kondisi Geografis	19
	3.2	Kependudukan	20
	3.3	Kesehatan	21
		3.3.1 Angka Harapan Hidup dan Penolong Persalinan	21
		3.3.2 Pemberian Imunisasi	24
	3.4	Pendidikan	24
		3.4.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan	25
		3.4.2 Rata–Rata Lama Sekolah	27
		3.4.3 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	28
		3.4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	29

	3.5	Produk Domestik Regional Bruto	30
		3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi	31
		3.5.2 Struktur Perekonomian	33
		3.5.3 PDRB Perkapita	34
BAB 4	**PENCAPAIAN KUALITAS HIDUP MANUSIA**		
	4.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur	35
	4.2	IPM Kabupaten/kota se Tana Luwu dan se Sulawesi Selatan	43

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Dimensi, Indikator dan Indeks Pembentuk IPM	9
Tabel 2.2	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang digunakan dalam penghitungan	10
Tabel 2.3	Konversi Lama Sekolah.	12
Tabel 2.4	Konversi Lama Sekolah berdasarkan Ijazah Terakhir untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	13
Tabel 2.5	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Kemampuan Daya Beli (PPP)	16
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2017	20
Tabel 3.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Persalinan Terakhir di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2017	22
Tabel 3.3	Persentase Baduta Menurut Lamanya Disusui (bulan) dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017	23
Tabel 3.4	Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lama Hari Sakit tahun 2016-2017	24
Tabel 3.5	Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2017	24
Tabel 3.6	Banyaknya Murid, Guru, Sekolah, Rasio Murid Guru dan Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017	26
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2017	28
Tabel 3.8	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017**)	32
Tabel 3.9	Persentase Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur, 2013–2017**)	33

Tabel 3.10	PDRB Per Kapita, 2013–2017**)	34
Tabel 4.1	Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 – 2017	41
Tabel 4.2	Angka Harapan Hidup Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 (tahun)	43
Tabel 4.3	Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 (tahun)	43
Tabel 4.4	Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 (tahun)	44
Tabel 4.5	Kemampuan Daya Beli Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah/kapita/Tahun)	44
Tabel 4.6	Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017	45
Tabel 4.7	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2017	46
Tabel 4.8	IPM Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Pertumbuhannya, 2016-2017 (persen)	47

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 3.1	Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 (persen)	21
Gambar 3.2	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017 (Tahun)	22
Gambar 3.3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Luwu Timur (tahun), 2013-2017	27
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2017	30
Gambar 3.5	Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Luwu Timur (persen), 2013-2017	31
Gambar 4.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017	36
Gambar 4.2	Perkembangan Indeks Kesehatan (persen) Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017	37
Gambar 4.3	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017	38
Gambar 4.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017	38
Gambar 4.5	Perkembangan Indeks Pendidikan (persen) Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017	39
Gambar 4.6	Perkembangan Paritas Daya Beli (ribu rupiah/kapita) di Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017	40
Gambar 4.7	Perkembangan Indeks Pengeluaran di Kabupaten Luwu Timur (persen), 2013-2017	40
Gambar 4.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, 2013-2017	42
Gambar 4.9	Perkembangan IPM Kab/Kota se- Tana Luwu dan Prov Sulawesi Selatan, 2013-2017	45
Gambar 4.10	IPM dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan Tahun 2017	48

INDEKS KUALITAS HIDUP MANUSIA

2017

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pembangunan adalah suatu proses menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan, dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut: pertama, paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*); kedua, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan (*Welfare paradigm*); dan ketiga, paradigma pembangunan yang berpusat paada manusia (*people centered development paradigm*).

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar yang ada di masyarakat tersebut dapat teratasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dicapai tetapi beberapa aspek pembangunan yang lainnya gagal. Lalu bagaimana menilai pembangunan manusia secara keseluruhan ?

Persoalan mengenai capaian pembangunan manusia dewasa ini telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Cakupan pembangunan manusia yang sangat luas dimaksud menjadikan berbicara mengenai pilihan-pilihan manusia adalah sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun diantara sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu; pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang; pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan pilihan untuk mencapai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*). Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut dapat dipenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan menangkap peluang yang ada untuk meningkatkan kehidupannya serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan

Dalam kerangka untuk menempatkan dimensi manusia Kabupaten Luwu Timur sebagai titik sentral dalam pembangunan dengan bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dianggap perlu menyusun Publikasi Indikator Kualitas Hidup Manusia Kabupaten Luwu Timur 2017. Sehingga diharapkan daerah mempunyai indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Selain itu publikasi ini untuk mengukur kualitas manusia serta memberikan gambaran umum kinerja pembangunan Kabupaten Luwu Timur selama periode 2013-2017. Dalam publikasi yang mengulas IPM ini juga menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

1.3 Manfaat dan Kegunaan

Selain sebagai salah satu indikator makro yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dilihat perkembangan kesejahteraan penduduk di wilayah dari tahun ke tahun dan keterbandingan dengan wilayah lainnya, IPM juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena menggambarkan kualitas penduduk berupa hidup sehat dan

berumur panjang, intelektualitas berupa kemampuan memilki ilmu pengetahuan dan standar hidup layak.

Secara umum manfaat data IPM sebagai berikut :

- Ukuran kinerja daerah (evaluasi proses pembangunan SDM)
- Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
- Mengetahui perkembangan hasil pembangunan SDM dalam berbagai aspek kehidupan
- Mengetahui capaian program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Mendapatkan "*feedback*" ataskekurang-berhasilan pembangunan
- Sebagai variabel pendukung penyusunan DAU
- Mengukur keterkaitan dengan proses pembangunan dibidang lainnya (ekonomi, sosial, politik dan sebagainya)

1.4 Fungsi, Lingkup dan Keterbatasan

Sejak diterbitkannya HDI oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu betul-betul diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Oleh karena itu kehadiran Laporan Indeks Pembangunan Manusia, salah satunya dalam bentuk publikasi ini, menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di daerah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam penyajian publikasi ini secara khusus hanya menyajikan IPM untuk mengukur indikator kualitas manusia.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang

ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu dimulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka dalam publikasi ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang dibutuhkan.

Untuk mengukur ketiga dimensi pembangunan yang disebutkan di atas dibentuk suatu ukuran berupa indeks komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan berdasar pada 3 indikator yaitu :

a. Angka Harapan Hidup yang mengukur hidup sehat dan umur panjang,
b. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang mengukur tingkat pengetahuan,
c. *Purchasing Power Parity* (PPP) yang merupakan ukuran pendapatan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli

1.5 Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kualitas Hidup Manusia Kabupaten Luwu Timur 2017 yang selanjutnya akan difokuskan pada penjelasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyajikan 4 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang; maksud dan tujuan; manfaat dan kegunaan; fungsi, lingkup dan keterbatasan; serta sistematika penulisan.

Bab II - Metodologi

Membahas tentang metodologi yang meliputi penjelasan IPM dan komponennya, metode penghitungan yang digunakan, pertumbuhan IPM, klasifikasi/tingkatan status IPM, sumber data yang digunakan dan beberapa konsep/istilah dan definisi.

Bab III - Gambaran Umum

Membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Luwu Timur yang diuraikan atas kondisi geografis, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Bab IV – Pencapaian Kualitas Hidup Manusia

Membahas mengenai komponen-komponen IPM diantaranya Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Paritas Daya Beli serta keterbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dengan kabupaten se-Luwu Raya dan Provinsi Sulawesi Selatan.

INDEKS KUALITAS HIDUP MANUSIA

2017

BAB II
METODOLOGI

BAB 2
METODOLOGI

2.1 Perkembangan Metodologi IPM

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. (Todaro dan Smith) Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Pada tahun 1990 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikembangkan oleh pemegang nobel India Amartya Sen dan sedorang ekonom Pakistan Mahbud ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Komponen IPM yang digunakan pada saat itu adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan PDB per kapita. Namun pada tahun 1991 terjadi penyempurnaan komponen IPM yang digunakan, yaitu AHH, AMH, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan PDB per kapita. Kemudian pada tahun 1995 terjadi penyempurnaan kembali terhadap komponen yang digunakan, yaitu AHH, AMH, kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan PBD per kapita. Pada tahun 2010 UNDP melakukan perubahan terhadap metodologi yang digunakan yaitu AHH, RLS, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan PNB per Kapita serta penghitungan agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik. Kemudian pada tahun 2011 dan 2014 penyempurnaan metodologi yaitu mengganti tahun dasar PNB dari 2005 menjadi 2011 serta merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

2.2 Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur merupakan sumber data pokok untuk keperluan penyusunan IPM. Susenas dilaksanakan dua kali setahun (semesteran) untuk mengumpulkan data kependudukan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dan sosial ekonomi lainnya yang terdapat dalam kuesioner Kor dan Modul.

2.3 Penyempurnaan Metodologi IPM Tahun 2014 (IPM metode baru)

Perubahan indikator dan metode dalam penghitungan IPM metode baru, yaitu:

1. Angka Melek huruf pada metode lama diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
2. Penghitungan peritas daya beli pada metode lama hanya terdapat 27 komoditas sedangkan pada metode baru terpilih 96 komoditas.
3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diantaranya:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. **Angka Melek Huruf (AMH)** sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
2. **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, karena masih memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut.
3. Penggunaan rumus **rata-rata aritmatik** dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Keunggulan IPM metode baru:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan **Rata-rata Lama Sekolah** dan angka **Harapan Lama Sekolah**, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. **PNB** menggantikan **PDB** karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan **rata-rata geometrik** dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dampak perubahan IPM metode baru diantaranya:

1. Secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama.
2. Terjadi perubahan peringkat IPM. Peringkat tidak bisa diperbandingkan akibat adanya perbedaan indikator dan metodologi.

2.4 Komponen IPM

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran umur panjang dan sehat digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan dimensi hidup layak digunakan indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

2.4.1 Umur Panjang dan Sehat

Umur panjang dan sehat diukur dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penghitungan AHH, yaitu Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung Angka Harapan Hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West* yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Penggunaan AHH didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan *resultante* dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup. Penggunaan batas maksimum angka tertinggi yang digunakan untuk penghitungan indeks yaitu 85 tahun dan terendah 20 tahun. Angka tersebut diambil dari standar UNDP dan BPS.

2.4.2 Pengetahuan

Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Dalam penghitungan indeks pendidikan, batasan nilai minimum dan maksimum juga digunakan sesuai standar UNDP dan BPS. Batas maksimum untuk HLS adalah 18 tahun sedangkan batas minimumnya adalah 0 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah menggunakan batas maksimum 15 tahun dan batas minimumnya 0 tahun.

2.4.3 Hidup Layak

Indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan yang lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. Ukuran tingkat kesejahteraan tersebut, diwakili oleh paritas daya beli. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar propinsi

dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul Konsumsi, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di satu propinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan rumus Atkitson.

2.4.4 Dimensi, Indikator, dan Indeks Pembentuk IPM

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan *(longevity)* yang diwakili dengan usia harapan hidup *(life expectancy at Age 0; e_0)*, komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expectancy Years School/ EYS*) dan Rata-rata Lama Sekolah *(Mean Years of Schooling/ MYS)* dan indikator hidup layak *(decent living)*atau kemakmuran yang diwakili oleh paritas daya beli (*Purchasing Power Parity;PPP*). Berhubung data PPP sulit diperoleh, maka terkadang sering digunakan PDRB riil per kapita.

Tabel 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembentuk IPM

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi	
(1)	(2)	(3)	
Umur panjang dan sehat	Angka harapan hidup pada saat lahir (e_0)	Indeks kesehatan→Indeks X1	**IPM**
Pengetahuan	1. Harapan lama Sekolah (EYS) 2. Rata-rata lama sekolah (MYS)	Indeks pendidikan→Indeks X2	
Kehidupan yang layak	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPP Rupiah)	Indeks Pendapatan→Indeks X3	

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang digunakan dalam penghitungan

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U$)	1.007.436* (Rp)	107.721(PPP U$)	26.572.352** (Rp)

* Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018
** Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

2.5 Teknik Penghitungan IPM dengan Metode Baru

2.5.1 Angka Harapan Hidup

Data yang dibutuhkan untuk memperoleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan Mortpak adalah estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun penghitungan dan estimasi rata-rata jumlah anak masih hidup pada tahun penghitungan. Penentuan AHH untuk IPM secara umum berlaku rataan q2, q3 dan q5; adakalanya memakai median/modus lebih cocok; perlu pertimbangan keahlian (adjustment), pengalaman, trend atau perbandingan (antar waktu, antar wilayah, antar urban/rural, dsb); AHH perempuan diperoleh dari: (106/103) x AHH total; sudah melalui rekonsiliasi dan telah diseminarkan pada seminar parameter demografi.

Penentuan asumsi berdasarkan tren tingkat mortalitas di masa lalu mengikuti hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI): SDKI91, SDKI94, SDKI97, SDKI2002/3, SDKI2007, SDKI2012, SDKI2017. Menggunakan 7 titik pengamatan (1991-2017) tanpa target.

Adapun rumus dalam menghitung tren tingkat mortalitas sebagai berikut :

$$y = L + \frac{U}{1 + be^{at}}$$

Y = Perkiraan IMR

L = Konstanta *asymtot* bawah IMR

U = Konstanta*asymtot* atas IMR

a,b = Koefisien kurva logistik

t = Waktu sebagai variabel bebas

e = Konstanta eksponensial

Rumus indeks kesehatan dapat disajikan sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudahkan penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

2.5.2 Harapan Lama Sekolah

Langkah pertama yaitu menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas); langkah kedua menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas); langkah ketiga menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas), langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur; langkah keempat menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).

Formula yang digunakan yaitu :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur *a* di tahun *t*

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

2.5.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Secara rinci penghitungan indikator rata-rata lama sekolah dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Ada empat kombinasi variabel pembentuk indikator rata-rata lama sekolah diantaranya, partisipasi sekolah; jenjang pendidikan yang pernah diduduki; kelas yang sedang dijalani; dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Langkah pertama adalah menyeleksi penduduk usia 25 tahun ke atas; langkah kedua yaitu menghitung lamanya sekolah, jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah sekolah, maka lama sekolah = 0, jika partisipasi sekolah yaitu masih sekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut :

Tabel 2.3 Konversi Lama Sekolah

Keterangan	Lama Sekolah
(1)	(2)
Masih bersekolah di SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket : karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Tabel 2.4 Konversi Lama Sekolah berdasarkan Ijazah Terakhir untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Ijazah	Konversi tahun lama sekolah
(1)	(2)
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2/S3	18

Langkah ketiga yaitu menghitung rata-rata lama sekolah dengan rumus :

$$RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk–i = lama sekolah penduduk ke-*i* di suatu wilayah

n = jumlah penduduk (*i = 1, 2, 3,..., n*)

Rumus indeks pengetahuan dapat disajikan sebagai berikut:

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

yang terdiri dari**: 1. Indeks Harapan Lama Sekolah :**

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

2. Indeks Rata-Rata Lama Sekolah :

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

2.5.4 Purchasing Power Parity (PPP)

Kemampuan Daya Beli (PPP) memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Paritas daya beli dihitung sebagai perbandingan rata-rata geometrik harga paket komoditas barang dan jasa di suatu wilayah terhadap Jakarta Selatan.

Kemampuan Daya Beli (PPP) dapat dihitung dengan empat cara yaitu **Pertama** menghitung rata-rata pengeluaran per kapita, **Kedua** menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil), **Ketiga** menghitung Paritas Daya Beli dan **Keempat** menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan.

Penghitungan rata-rata pengeluaran perkapita dilakukan dengan 3 tahap, yaitu menghitung pengeluaran per kapita (anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap kabupaten; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan ((Y'_t) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan x 12 / 1000).

- Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y'_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

- Menghitung paritas daya beli dilakukan dengan 3 tahap, yaitu
  - Tahap pertama menghitung harga rata-rata komoditas terpilih dengan rumus :

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah

V_i = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah

Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK, yaitu:

- Perlengkapan mandi → pasta gigi, sabun mandi, shampo, sikat gigi
- Barang habis pakai rumah tangga → bola lampu, lampu TL/neon, korek api gas, obat nyamuk bakar, pembasmi nyamuk cair, pembasmi nyamuk spray, pembersih laintai
- Sabun cuci → sabun cuci piring, sabun *creamdetergent*
- Barang kecantikan → bedak, deodorant, body lotion, lipstik, minyak rambut, minyak parfum, pelembap muka, pembersih dan penyegar
- Perawatan kulit, kuku, mka, rambut → tarif creambath, potong rambut pria, potong rambut wanita, potong rambut anak
- Biaya kesehatan → biaya dokter umum
- SPP → SD
- Transportasi → angkutan dalam kota
- Alas kaki → sandal kulit pria
- Meubelair → meja kursi tamu
- Peralatan rumah tangga → lemari es
- Perlengkapan perabot rumah tangga → sprei
- Alat dapur/makan → kompor

➢ Tahap kedua yaitu menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut

$$\text{Paritas Daya Beli}_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{1/m}$$

Keterangan :

p_{ij} = harga komoditas *i* di Jakarta Selatan

p_{ik}= harga komoditas *i* di kab/kota *j*

m= jumlah komoditas

Tabel 2.5 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Kemampuan Daya Beli (PPP)

Kelompok	Share kelompok	Terpilih	
		Share	Jumlah item
(1)	(2)	(3)	(4)
MAKANAN	**47,29**	**39,82**	**66**
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
NON MAKANAN	**52,71**	**33,81**	**30**
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, alas kaki,tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0,00	0
TOTAL	**100,00**	**73,63**	**96**

Sumber:Survei Sosial Ekonomi Nasional

- Tahap ketiga, menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan :Y_t**= rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t*= Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Ilustrasi Penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

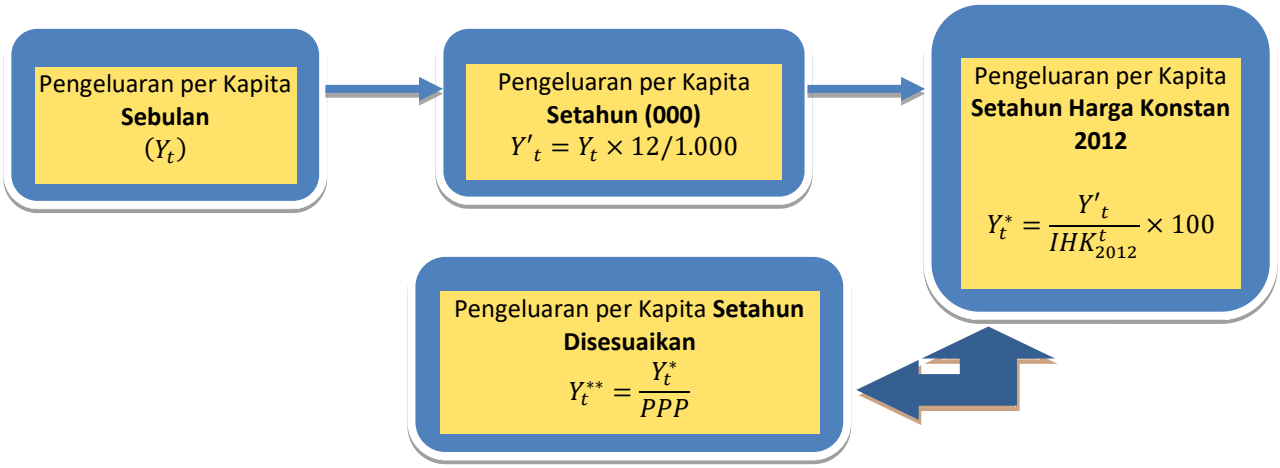

Rumus Indeks Pendapatan berikut:

$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

2.6 Kecepatan Perubahan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM pertahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan: IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.7 Klasifikasi/tingkatan Status IPM

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

Tingkatan status Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam empat golongan yaitu :

(a) **Rendah** apabila IPM kurang dari 60,

(b) **Sedang atau Menengah** apabila IPM antara 60 sampai dengan kurang dari 70,

(c) **Tinggi** apabila IPM antara 70 sampai dengan kurang dari 80 dan

(d) **Sangat Tinggi** apabila IPM mulai dari 80 ke atas.

Pengklasifikasian capaian IPM dapat dilihat pada gambar berikut :

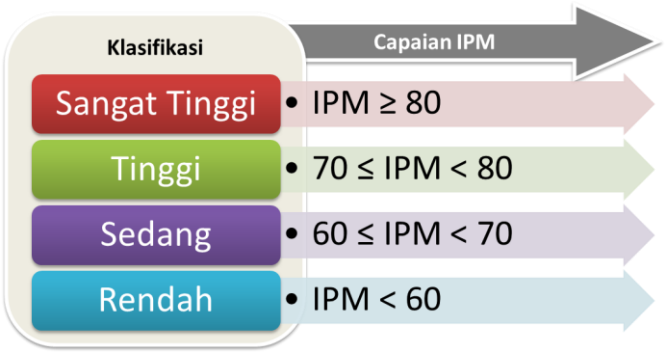

INDEKS KUALITAS HIDUP MANUSIA

2017

BAB III
GAMBARAN UMUM

BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak pada posisi antara 2^0 03'00"- 3^0 03'25" Lintang Selatan dan 119^0 28'56"-121^0 47'27" Bujur Timur. Merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian paling timur. Secara administrasi wilayah Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur sekitar 6.944,88 km^2 atau sekitar 11,14 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini terdiri dari 11 kecamatan, 124 desa dan 3 kelurahan dengan Ibukota Malili.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2017 tercatat rata-rata curah hujan mencapai 289.25 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 20 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 474 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari.

Terdapat 14 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat 5 danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano yang berada di Kecamatan Nuha, sedangkan Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Taparang Masapi, dan Danau Lantoa berada di Kecamatan Towuti. Danau yang terdalam adalah Danau Matano (589 m) dan danau yang terluas adalah Danau Towuti (585 km^2).

3.2 Kependudukan

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebanyak 287.874 jiwa, dimana 147.984 adalah laki-laki dan 139.890

perempuan. Angka tersebut meningkat 2,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Rasio jenis kelamin *(sex ratio)* sekitar 105,79 yang berarti bahwa diantara 100 perempuan terdapat sekitar 106 laki-laki.

Pada tabel 3.1, tampak bahwa penduduk laki-laki yang mendominasi pada kelompok umur 0-14 tahun dan 15-64 tahun, sedangkan penduduk perempuan lebih mendominasi di usia 65 tahun ke atas, artinya harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Secara umum penambahan penduduk terlihat pada semua kelompok umur.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2017

Kelompok Umur	2016			2017		
	Laki laki	Perempuan	Total	Laki laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
0-14	45.967	43.903	89.870	46.507	44.529	91.036
15-64	93.176	87.151	180.327	95.457	89.281	184.738
65+	5.769	5.856	11.625	6.020	6.080	12.100
Total	144.912	136.910	281.822	147.984	139.890	287.874

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Komposisi penduduk pada tabel diatas mencerminkan angka beban tanggungan (ABT) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2017 sekitar 64,17 persen, sedangkan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya sekitar 4,20 persen dan penduduk usia muda (0-14 tahun) sekitar 31,63 persen. Dengan demikian angka beban tanggungan (ABT) penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 yaitu sekitar 55,83 yang artinya dari 100 penduduk usia produktif 15-64 tahun akan menanggung secara ekonomi sekitar 55-56 penduduk usia tidak produktif. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, dimana ABT pada tahun tersebut adalah 56,28 maka terlihat adanya penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Ketika persentase penduduk usia tidak produktif semakin menurun, maka sebaliknya persentase penduduk usia produktif semakin meningkat, sehingga pada akhirnya nanti akan dihasilkan bonus demografi dimana ABT di bawah 50 persen.

Piramida penduduk menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur masih didominasi oleh kelompok umur 0-4 tahun, yaitu sekitar 11,40 persen dari total penduduk, dengan persentase lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Sedangkan persentase penduduk terkecil sebesar 2,49 persen berada pada kelompok umur 60-64 tahun.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 (persen)

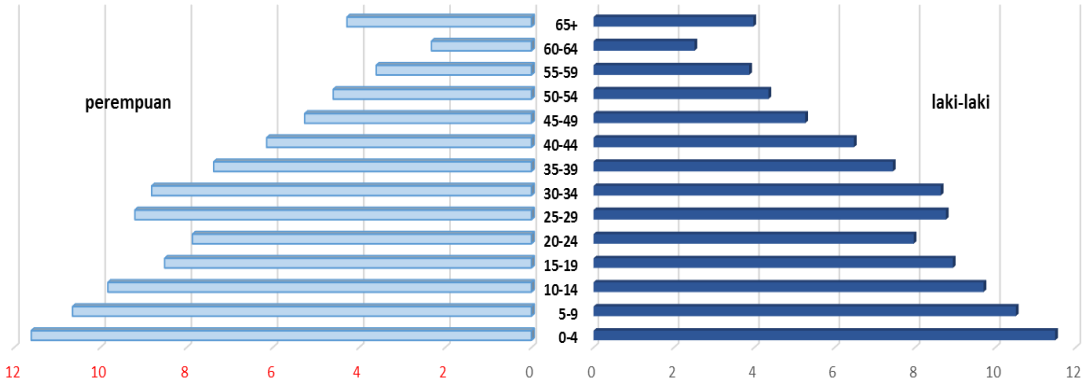

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Hal yang penting juga adalah istilah *aging population*, yaitu berapa besar populasi penduduk yang berusia 60 tahun lebih. Suatu wilayah dikatakan masuk dalam kategori *aging population* jika penduduk usia 60 tahun lebih berjumlah lebih dari 10 persen. Meskipun Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu wilayah transmigrasi di Sulawesi Selatan, namun sampai saat ini masih belum mencapai fase *aging population*. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa usia 60 tahun lebih baru mencapai 6.69 persen.

3.3 Kesehatan

3.3.1 Angka Harapan Hidup dan Penolong Persalinan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang dan hidup sehat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduknya. Salah satu yang menentukan angka harapan hidup adalah kematian bayi. Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi cukup. Pada umumnya kekurangan gizi berkorelasi positif dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir lebih rendah, juga berkaitan erat dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman dan perawatan bayi pada saat dilahirkan.

Dari tabel 3.2 dapat dilihat pada tahun 2013-2017 persentase penolong kelahiran tertinggi adalah bidan. Walaupun masih ada penolong kelahiran oleh dukun, namun persentasenya tergolong kecil. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat di Kabupaten Luwu Timur akan petingnya kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan yang pada akhirnya akan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Tabel 3.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Persalinan Terakhir di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2017

Penolong Persalinan	2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Tenaga Medis	**78,62**	**82,95**	**95,97**	**96,43**	**98,72**
Dokter	11,74	12,76	25,12	25,68	18,42
Bidan	66,88	70,19	70,85	70,75	80,30
Tenaga Non Medis	**21,38**	**17,05**	**4,03**	**3,57**	**1,28**
Dukun	20,45	14,21	4,03	1,03	-
Keluarga	0,75	2,54	-	-	-
Lainnya	0,18	0,30	-	2,54	1,28
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Susenas 2013-2017

Angka Harapan Hidup (AHH;e_0) merupakan salah satu indikator pembentuk IPM sebagai ukuran derajat kesehatan masyarakat. Dalam Publikasi Statistik Indonesia, AHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. AHH di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2017

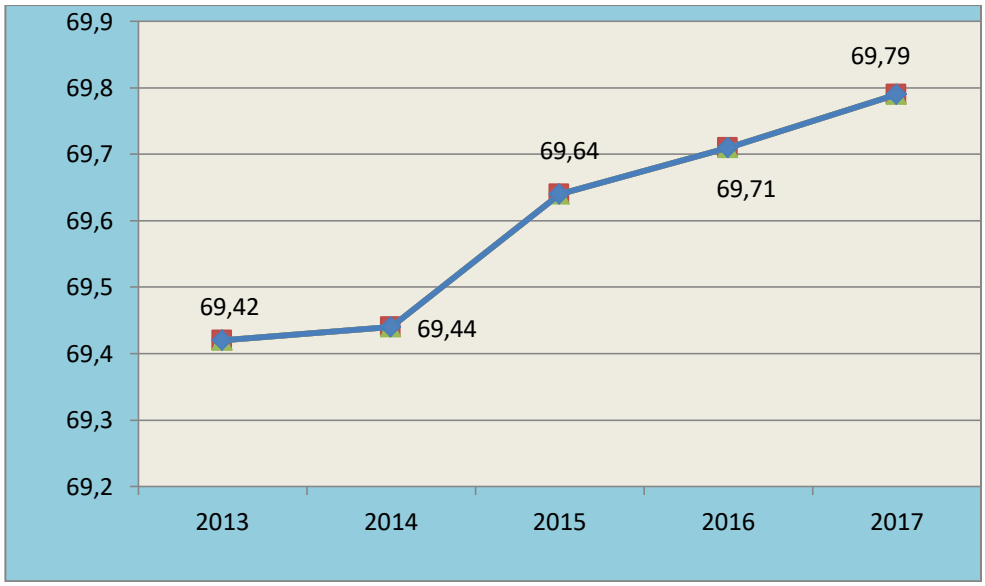

Sumber: IPM Prov. Sulawesi Selatan 2013-2017

AHH Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH di antaranya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), persentase bayi berusia 0-11 bulan yang

diberi Air Susu Ibu (ASI) selama 4-6 bulan, dan variabel persentase balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Selain faktor penanganan pada saat persalinan, tinggi rendahnya AKB juga dipengaruhi oleh kualitas gizi berupa pemberian ASI. Di Kabupaten Luwu Timur kesadaran para ibu untuk memberikan ASI pada anaknya, nampaknya cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil SUSENAS pada tahun 2017, dari total penduduk usia bawah dua tahun (baduta) ternyata yang telah diberikan ASI sudah mencapai 95,85 persen.

Tabel 3.3 Persentase Baduta Menurut Lamanya Disusui (bulan) dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017

Lama Disusui (bulan)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak pernah menyusu	7.65	0,00	4,15
0-11	61,86	34,05	49,16
12-15	17,15	38,27	26,80
16-19	7,54	14,15	10,56
20-23	5,80	13,53	9,33
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2017

Pemberian ASI untuk balita paling banyak diberikan selama kurang dari 12 bulan yaitu sekitar 49,16 persen. Sementara baduta yang tidak pernah menyusu hanya tersisa 4,15 persen.

Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan penduduk seharusnya diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, kemudahan akses ke sarana/fasilitas kesehatan, serta program gratis berobat yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang diderita akan lebih awal mendapat penanganan atau pengobatan dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit sebagaimana tertera pada tabel 3.4.

Penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir pada periode survei sebagian besar sembuh kurang dari empat hari. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur cukup bagus dengan menangani pasien dengan cepat dan baik.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lama Hari Sakit di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2017

Lama Hari Sakit	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+ Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<4	49,69	58,24	48,73	60,70	49,23	59,45
4-7	35,55	30,24	37,78	31,06	36,62	30,64
8-14	8,94	3,18	9,58	2,76	9,25	2,97
15-21	2,51	2,77	1,97	2,24	2,25	2,51
22-30	3,31	5,57	1,94	3,24	2,65	4,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016-2017

3.3.2 Pemberian Imunisasi

Salah satu indikator kesehatan bagi balita adalah pemberian imunisasi. Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara diminum (diteteskan dalam mulut) atau disuntikkan, dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Dari tabel di bawah ini, terlihat bahwa sebagian besar balita di Kabupaten Luwu Timur sudah mendapat imunisasi, baik itu BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B, meskipun persentase yang menurun dibanding tahun lalu.

Tabel 3.5 Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2017

Jenis Imunisasi	Persentase Balita	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
BCG	93,34	89,85
DPT	90,78	85,68
Polio	93,70	89,85
Campak/Morbili	80,12	59,40
Hepatitis B	93,97	84,60
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016 - 2017

3.4 Pendidikan

Tujuan pembangunan di bidang pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

ini, diantaranya membangun fasilitas pendidikan dasar dan menengah di seluruh pelosok tanah air, menambah jumlah tenaga pendidik, dan membebaskan biaya pendidikan sampai tingkat menengah. Berbagai upaya ini dan usaha-usaha lainnya ditujukan untuk mempermudah akses terhadap pendidikan bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah.

Peningkatan SDM mutlak dilakukan karena SDM berkualitaslah yang akan mampu bersaing dengan SDM negara lain. berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Karena sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang penting. Pentingnya pendidikan dalam proses pembangunan tersebut harus disikapi secara sungguh-sungguh. Keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan terlihat melalui pelaksanaan program wajib belajar 6 tahun yang telah dimulai sejak tahun 1984. Tidak berhenti sampai disitu, sejak tahun 1994 program wajib belajar yang dilaksanakan menjadi wajib belajar 9 tahun.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang tidak hanya turut serta menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, tapi juga turut mendukung program pemerintah lainnya di bidang pendidikan, diantaranya menggratiskan biaya pendidikan dasar sampai menengah. Berkaitan dengan hal tersebut, bab ini menyajikan secara umum keadaan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur dari beberapa indikator diantaranya Rasio Murid Guru, Rasio Murid Sekolah, partisipasi sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3.4.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap maju mundurnya dunia pendidikan.Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru pada daerah terpencil.Isu yang masih sering terdengar adalah sebagian besar guru enggan ditempatkan pada daerah terpencil, sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah perkotaan.

Ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula.

Rasio Murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio Murid Guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan guru dengan mudah memantau aktivitas murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang RMG yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Gambaran RMG untuk jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA pada tahun 2017 ditunjukkan pada Tabel 3.6. Secara umum, RMG pada jenjang pendidikan atas lebih tinggi dibanding pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

RMG pada jenjang pendidikan SD/sederajat pada tahun 2017 sekitar 13,32 atau terdapat sekitar 13-14 murid diajar oleh seorang guru. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SLTP/sederajat sekitar 12,61 atau terdapat sekitar 12-13 murid diajar oleh seorang guru. Sementara pada jenjang pendidikan SLTA/sederajat sekitar 14,91 atau terdapat sekitar 14-15 murid/siswa diajar oleh seorang guru.

Rata-rata banyaknya murid yang bersekolah dalam setiap jenjang pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan jumlah murid terhadap sekolah (Rasio Murid Sekolah). Salah satu kegunaannya adalah untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah. Selain itu angka tersebut juga dapat digunakan untuk melihat apakah sudah waktunya pemerintah atau pihak swasta membangun sekolah baru pada suatu tempat. Pada tabel 3.6, disajikan rasio murid terhadap sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA (termasuk SMK) di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.6 Banyaknya Murid, Guru, Sekolah, Rasio Murid Guru dan Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	RMS	RMG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/sederajat	185	33.777	2.536	182,58	13,32
SLTP/sederajat	70	16.484	1.307	235,49	12,61
SLTA/sederajat	33	12.642	848	383,09	14,91

Sumber : *Profil Kabupaten Luwu Timur 2017*

Rasio murid terhadap sekolah di Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 pada tingkat SD/sederajat mencapai 182,58 murid per sekolah. Sedang untuk tingkat SLTP/sederajat mencapai sekitar 235,49 siswa per sekolah dan pada tingkat SLTA/sederajat sekitar 383,09 siswa per sekolah. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Timur, semakin tinggi rasio murid terhadap sekolah. Hal ini menandakan jumlah sekolah terutama sekolah SLTA/sederajat di masih perlu ditambah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan..

3.4.2 Rata–Rata Lama Sekolah

Indikator penting lainnya yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk.

Gambar 3.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Luwu Timur (tahun), 2013-2017

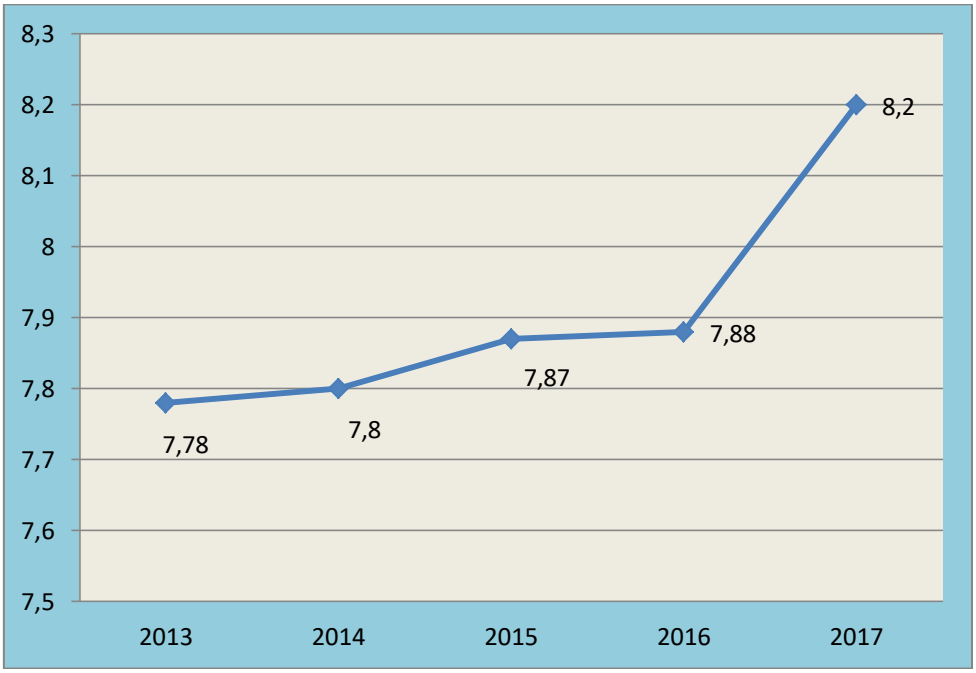

Sumber: BPS Prov. Sulsel

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2013-2016 menunjukkan kenaikan yang lambat. Tetapi pada tahun 2017 sedikit melaju hingga mencapai angka 8,20. Seperti pada gambar 3.3, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas baru menyelesaikan pendidikan selama 8 tahun yaitu sampai dengan kelas 2 SMP atau putus

sekolah di kelas 3 SMP. Peningkatan rata-rata lama sekolah selama kurun waktu 5 tahun tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga masih sangat perlu mendapatkan perhatian.

3.4.3 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan penduduk juga menjadi gambaran tingkat kesejahteraan rakyat dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 3.7 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2017

Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+ Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Tidak Punya Ijazah	15,44	17,04	19,54	21,10	17,45	19,02
SD	42,87	26,79	38,96	26,67	40,95	26,73
SMP	8,86	19,60	10,59	21,07	9,71	20,32
SMA ke atas	32,83	36,57	30,91	31,16	31,89	33,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2016-2017

Pada tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu timpang. Perbedaan tertinggi pada tahun 2017 hanya sekitar 5 persen saja. Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, persentase penduduk yang telah menamatkan jenjang SMP, SMA atau perguruan tinggi mengalami peningkatan sedangkan yang menamatkan jenjang SD mengalami penurunan. Ini suatu pertanda positif adanya peningkatan kualitas bidang pendidikan dari segi kepemilikan ijazah.

3.4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS merupakan salah satu indikator yang menggambarkan secara umum mengenai banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memandang atau tanpa memperhatikan jejang pendidikan yang sedang diikuti. Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan juga dapat dilihat dari peningkatan APS. Semakin banyak anak umur sekolah yang masih aktif sekolah maka program pemerintah di sektor pendidikan dapat dikatakan berhasil, namun sebaliknya jika persentase anak umur sekolah yang masih sekolah cenderung rendah maka program pemerintah dapat dinilai gagal. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi sekolah antara lain membangun sarana dan prasarana pendidikan dan memberikan subsidi bagi sekolah-sekolah negeri, sehingga penduduk yang yang kurang mampu juga dapat bersekolah. Selain itu mulai pertengahan tahun 2014, pemerintah telah meluncurkan program BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang peruntukkannya untuk siswa yang orang tuanya tidak mampu.

APS untuk SD misalnya, diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) yang masih/sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia Sekolah Dasar. Begitu juga perlakuannya pada jenjang SLTP, SLTA, dan sebagainya APS di sini adalah persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk usia tersebut.

Pada gambar 3.4 terlihat bahwa APS untuk usia sekolah dasar (7-12 tahun) pada tahun 2017 adalah 99,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Luwu Timur sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Selanjutnya pada jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (13-15 tahun) mencapai 97,68 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (16-18 tahun) baru mencapai 72,28 persen.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2017

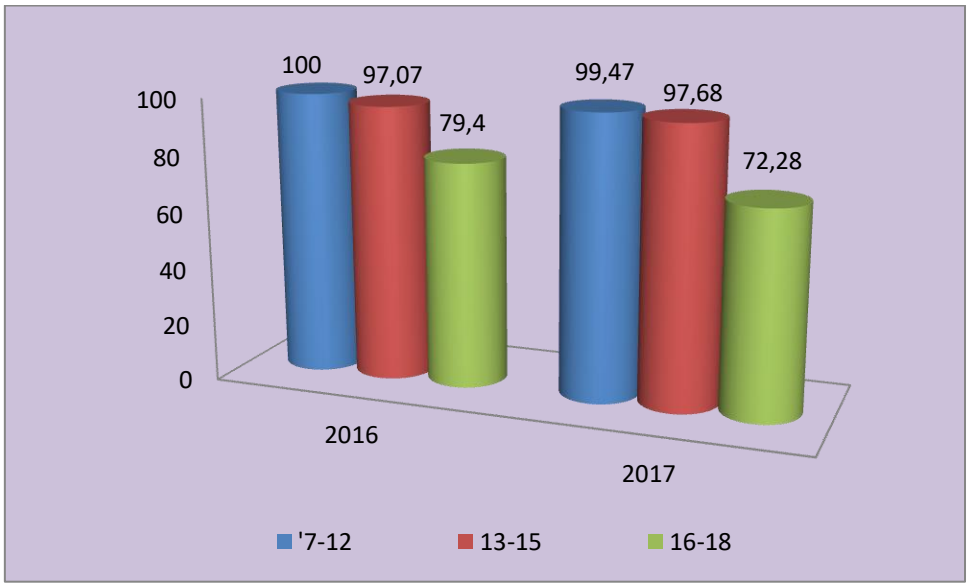

Sumber: Susenas 2016-2017

Harapan pemerintah tentu setiap tahun APS pada setiap kelompok umur sekolah mengalami peningkatan, karena hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bermutu dan berkesetaraan. Dari gambar 3.4 diketahui bahwa pada tahun 2017, persentase APS untuk semua kelompok usia sekolah hanya kelompok umur 13-15 yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk sekolah mengalami penurunan.

3.5 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi dan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui PDRB dapat diketahui kinerja ekonomi, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB per kapita suatu daerah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB maupun agregat turunannya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Produksi, Pengeluaran dan Pendapatan yang disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai

dengan menggunakan harga pada tahun berjalan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Angka tersebut lebih dikenal dengan istilah Pertumbuhan Ekonomi, yaitu proses kenaikan *output* per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan.

Seperti tahun sebelumnya, perekonomian Luwu Timur pada tahun 2017 mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan 2 tahun sebelumnya meskipun mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu timur tahun 2017 sebesar 3,07 persen, sedangkan tahun 2016 mencapai 1,58 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian, disebabkan peranan kategori tersebut sangat besar (53,65 persen) terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.

Gambar 3.5 Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Luwu Timur (persen) 2013-2017

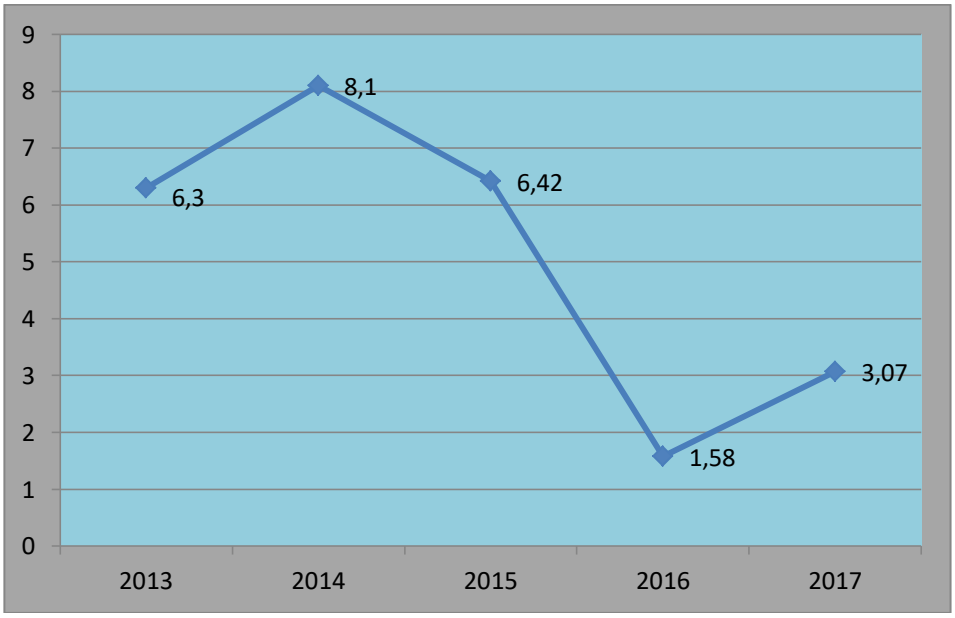

Sumber: PDRB Menurut Lapangan USaha Kab. Luwu Timur 2013-2017

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (persen), 2013–2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,33	9,08	8,39	8,15	2,91
B. Pertambangan dan Penggalian	5,28	8,90	5,24	-2,23	1,72
C. Industri Pengolahan	11,56	10,55	7,45	7,85	4,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,74	14,16	5,46	14,19	7,30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,47	1,82	0,17	5,44	12,07
F. Konstruksi	11,74	2,31	8,32	6,75	6,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,04	4,09	8,59	8,29	8,99
H. Transportasi dan Pergudangan	7,73	10,62	7,55	3,76	6,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,57	4,42	6,06	9,01	5,36
J. Informasi dan Komunikasi	16,82	5,86	10,68	9,01	9,85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,28	10,23	5,51	6,19	3,67
L. Real Estate	10,64	12,79	7,39	7,30	6,61
M,N. Jasa Perusahaan	8,65	3,50	5,87	7,50	6,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	1,87	8,91	1,73	6,70
P. Jasa Pendidikan	15,73	3,15	7,25	6,30	5,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,61	7,27	9,31	7,09	7,60
R,S,T,U. Jasa lainnya	6,74	7,48	8,99	9,10	9,53
PDRB	**6,30**	**8,10**	**6,42**	**1,58**	**3,07**

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Luwu Timur 2013-2017**

Pada umumnya pertumbuhan kategori selama kurun waktu 2013-2017 bisa dikatakan berfluktuasi. Dari 17 kategori ada 8 kategori yang mengalami percepatan pada tahun 2017. Kedelapan kategori yang mengalami percepatan yaitu kategori *Pertambangan dan Penggalian,* kategori *Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,* kategori *Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*, kategori *Transportasi dan Pergudangan,* kategori *Informasi dan Komunikasi*, kategori *Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,* kategori *Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan* kategori *Jasa Lainnya.* Pertumbuhan riil ekonomi kategori *Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang* tumbuh paling tinggi dibanding dengan kategori yang lain, yaitu sekitar 12,07 persen. Kategori ini juga mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi yaitu 6,63 poin. Lebih

banyaknya kategori yang tumbuh melambat dibandingkan dengan kategori yang mengalami percepatan pertumbuhan, memperlihatkan bahwa secara umum, kondisi perekonomian di Kabupaten Luwu Timur masih sedang menurun meskipun sudah agak meningkat dibanding tahun sebelumnya.

3.5.2 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori-kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Komposisi PDRB atas dasar harga berlaku yang terbentuk dari setiap kategori serta besarnya kontribusi yang diberikan oleh kategori tersebut dalam pembentukan PDRB, dapat memberikan gambaran struktur perekonomian dari wilayah tersebut. Semakin besar peranan suatu kategori ekonomi terhadap pembentukan total PDRB, semakin besar pula pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan perekonomian suatu wilayah.

Tabel 3.9 Persentase Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur, 2013–2017

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,90	16,76	19,39	21,79	21,29
B. Pertambangan dan Penggalian	64,68	63,95	58,28	53,41	53,65
C. Industri Pengolahan	2,30	2,45	2,88	3,27	3,14
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	6,48	6,31	7,32	7,93	8,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,73	2,50	2,89	3,33	3,45
H. Transportasi dan Pergudangan	0,47	0,51	0,62	0,66	0,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,14	0,16	0,17	0,18
J. Informasi dan Komunikasi	1,05	0,99	1,08	1,22	1,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,56	0,67	0,79	0,82
L. Real Estate	1,45	1,65	1,93	2,19	2,17
M,N. Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,72	1,68	1,97	2,08	2,17
P. Jasa Pendidikan	1,56	1,49	1,65	1,83	1,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,85	1,00	1,13	1,10
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11
PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Luwu Timur 2013-2017**

Dari tabel 3.9 diketahui bahwa kategori *Pertambangan dan Penggalian* masih menjadi kategori dominan dalam perekonomian di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2017, kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur mencapai 53,65 persen. Selama kurun waktu 2013-2017 kategori ini memang masih menjadi kategori yang paling berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Luwu Timur, dengan kontribusi setiap tahunnya lebih dari 50 persen. Sedangkan kategori *Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan* yang umumnya menjadi kategori unggulan hampir disemua kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, menempati urutan kedua. Kategori ini mampu memberikan kontribusinya sekitar 21,29 persen. Meskipun tidak mendominasi, namun kategori ini juga cukup berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Luwu Timur. Penyumbang terbesar ketiga yaitu kategori *Konstruksi* dengan persentase berkisar antara 6-8 persen. Sementara kategori *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* dan kategori *Industri Pengolahan* berada di bawahnya dengan kontribusi berkisar pada 2-3 persen.

3.5.3 PDRB Perkapita

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dari tabel 3.10, terlihat bahwa angka PDRB perkapita ADHB selama kurun waktu 2013-2017 berfluktuasi. Dari tahun 2013 hingga 2014 nilainya meningkat, dari 63,35 juta rupiah mencapai 70,63 juta rupiah. Namun 2 tahun berikutnya, semakin menurun hingga pada tahun 2016, nilainya menjadi 67,68 juta rupiah. Kemudian naik kembali pada tahun 2017 hingga mencapai 70,34 juta rupiah.

Tabel 3.10 PDRB Per Kapita, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	16.662.673,5	19.027.930,5	19.216.561,8	19.073.331,3	20.250.364,6
2. Penduduk	263.012	269.405	275.595	281.822	287.874
3. PDRB Per kapita	63.35	70.63	69.72	67.68	70,34

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Luwu Timur 2013-2017**

INDEKS KUALITAS HIDUP MANUSIA

2017

BAB IV
PENCAPAIAN KUALITAS HIDUP MANUSIA

BAB IV
PENCAPAIAN KUALITAS HIDUP MANUSIA

4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat *(of people)*, untuk rakyat *(for people)*, dan oleh rakyat *(by people)*. Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara adil, hasil pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada kehidupan rakyat sehari-hari, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Proses ini biasanya tidak secara otomatis tampak, akan tetapi memerlukan waktu serta manajemen kebijakan yang hati-hati. Pembangunan oleh rakyat berarti rakyat harus benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan saja. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya.

Dua hal yang ditekankan pada konsep pembangunan manusia yaitu; (1) peningkatan kapabilitas atau pemberdayaan dan (2) penciptaan peluang. Antara kapabilitas dan peluang harus seimbang. Bila kapabilitas berhasil ditingkatkan melalui pembangunan SDM, namun tidak ada peluang atau sebaliknya bila peluang telah tercipta tapi tidak ditopang oleh kemampuan SDM maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM diantaranya yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; harapan lama sekolah, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini :

- Umur panjang dan kehidupan yang sehat dengan indikator angka harapan hidup;
- Pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi;
- Standar hidup layak dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk Purchasing *Power Parity* (PPP).

a. Indeks Kesehatan

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir (e_0) menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2013-2017 AHH di Kabupaten Luwu Timur terus meningkat. Artinya harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Saat ini AHH Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 69,79 tahun.

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang (Sumber : Renstra Kemenkes 2015-2019). Hal ini dilakukan sebagai investasi bagi pembangunan manusia yang produktif secara sosial ekonomis. Keberhasilan dalam melakukan

pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Kenaikan indeks kesehatan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 sama dengan kenaikan tahun sebelumnya sebesar 0,12 poin. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan perkembangan dua tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2014-2015 yang bisa mencapai angka 0,30 poin dan merupakan perkembangan tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Gambar 4.2 Perkembangan Indeks Kesehatan (persen) Kabupaten Luwu Timur 2013-2017

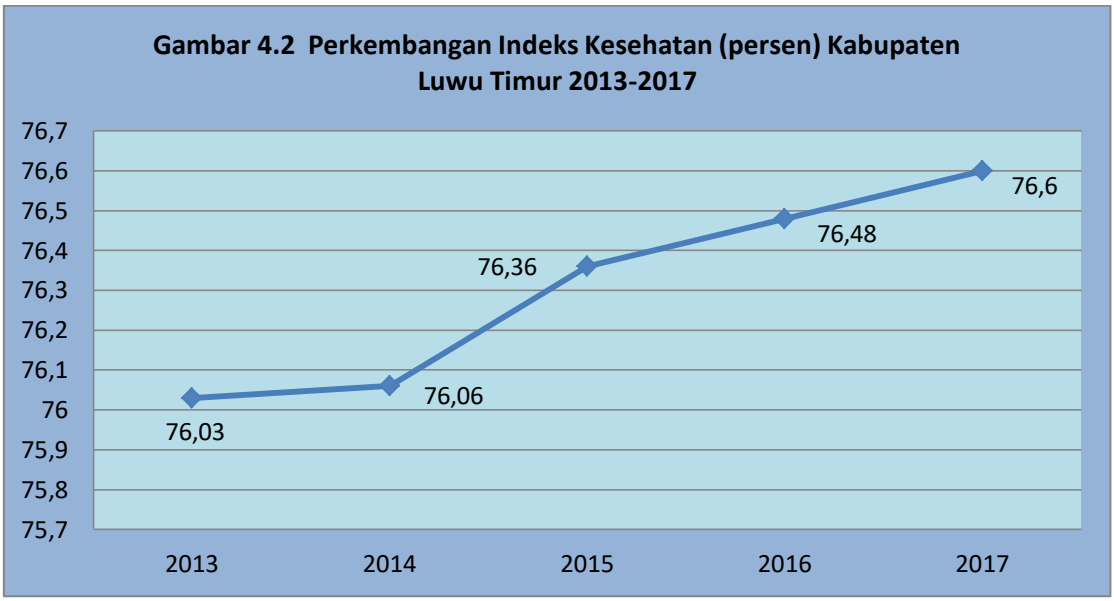

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

b. Indeks Pendidikan

Untuk mengukur pencapaian pembangunan dibidang pengetahuan digunakan Indeks pendidikan yang merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Harapan lama sekolah menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak (umur 7 tahun ke atas). Sementara indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Perkembangan Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan yang telah dicapai selama 5 tahun terakhir disajikan dalam beberapa gambar berikut.

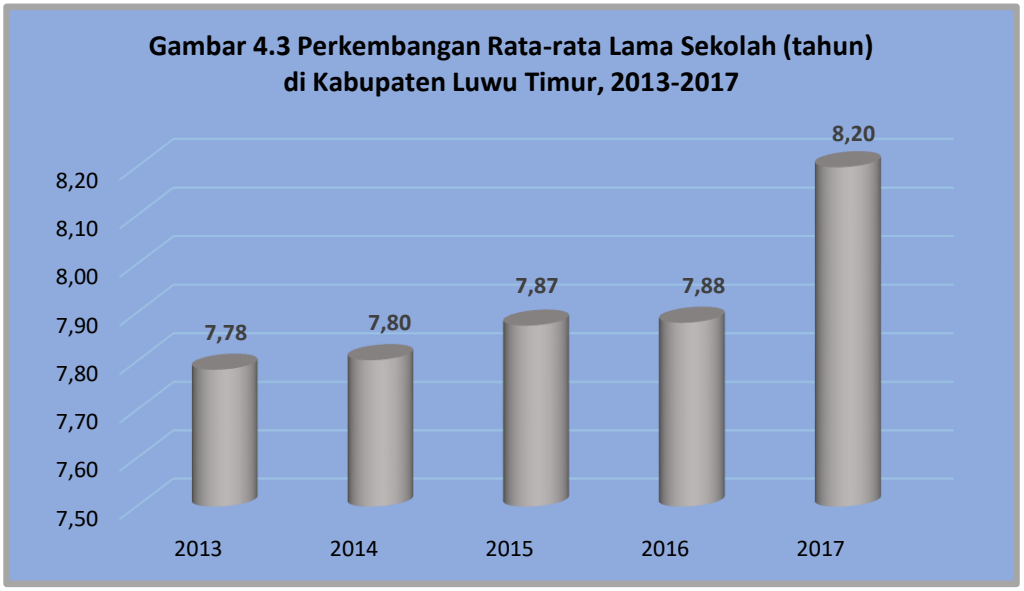

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 8,20 tahun meningkat sebesar 0,32 poin atau meningkat 4,06 persen. Angka ini merupakan peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dengan melihat angka 8,20 tahun berarti pendidikan rata-rata penduduk Kabupaten Luwu Timur baru mencapai tingkat SLTP kelas 2 masih sama dengan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk. Komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah perlu terus digalakkan dan disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud SDM yang berkualitas.

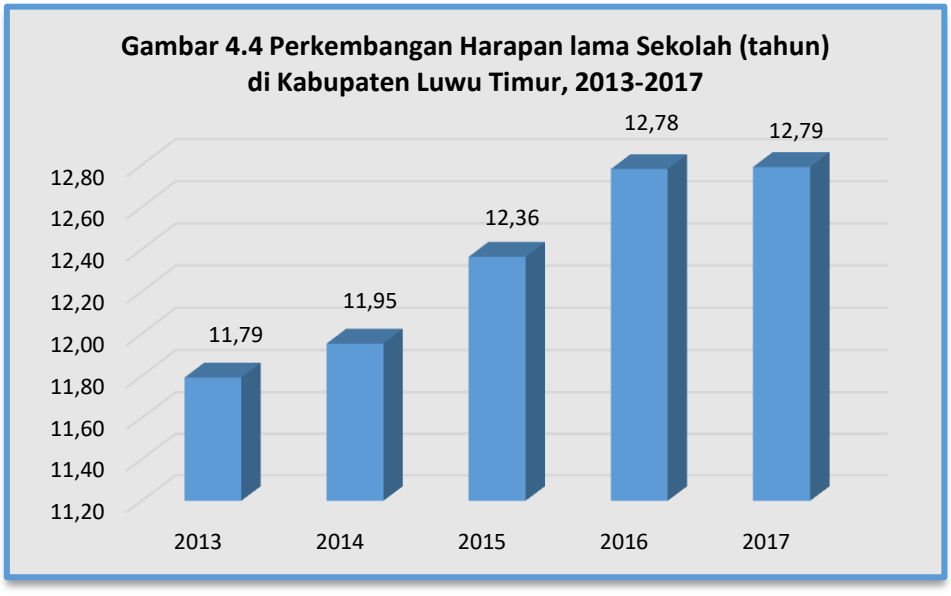

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Harapan lama sekolah di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 telah mencapai 12,79 tahun. Hal ini berarti bahwa anak-anak berusia 7 tahun ke atas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal hingga 12 tahun (kelas 12). Perkembangan Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 hanya mencapai angka 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Perkembangan tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun lalu yang meningkat hingga mencapai angka 0,42 poin melebihi perkembangan tahun sebelumnya (2015) yang hanya mencapai 0,41 poin.

Gambar 4.5 Perkembangan Indeks Pendidikan (persen) Kabupaten Luwu Timur, 2012-2016

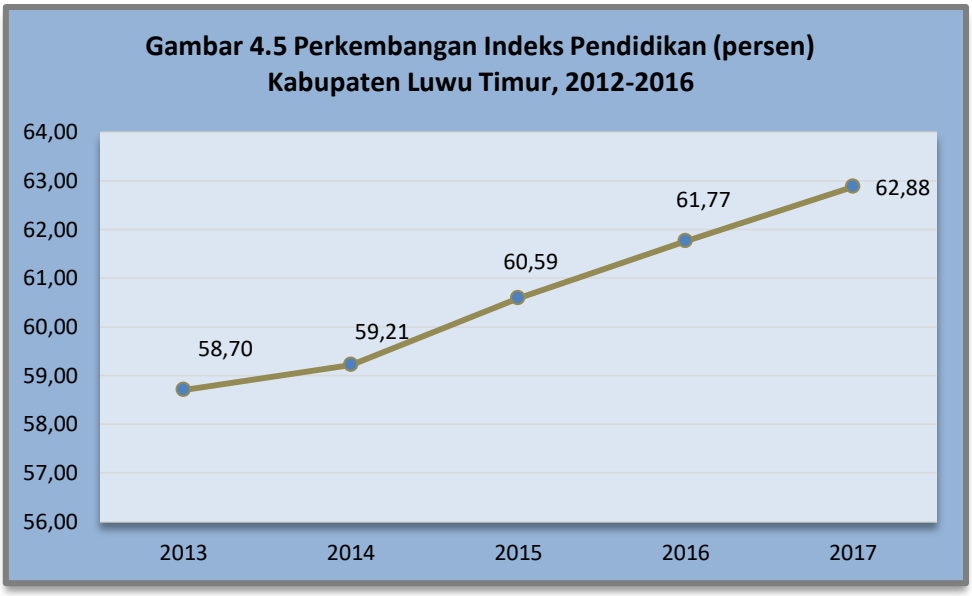

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Dari tahun 2013 ke 2014 meskipun nilai indeks pendidikan meningkat, namun kenaikannya tidak mencapai 1 poin. Tetapi selama tiga tahun terakhir, tren indeks tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Indeks pendidikan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 sebesar 62,88 persen, meningkat 1,11 poin dari tahun 2016. Sedikit melambat dari tahun sebelumnya yang meningkat 1,18 poin.

c. Indeks Pengeluaran

Standar hidup layak atau komponen kemampuan daya beli atau dikenal sebagai komponen PPP *(Puschasing Power Parity)* dihitung dari nilai konsumsi riil perkapita. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah, karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan kemampuan daya beli.

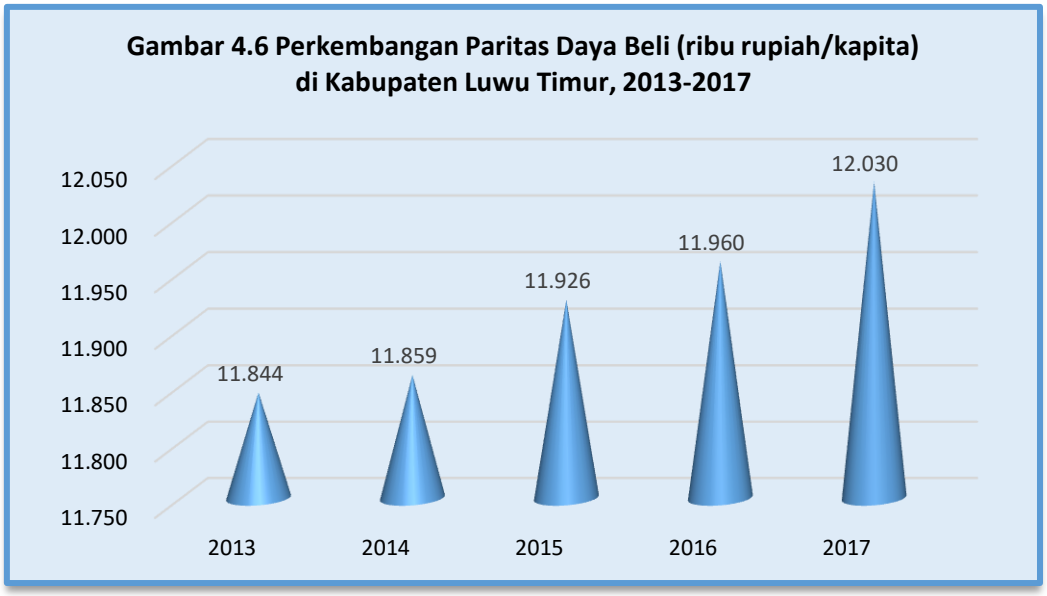

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Pencapaian indeks PPP sekitar 75,78 persen, berarti bahwa daya beli masyarakat Luwu Timur rata-rata sebesar Rp 12.030.000,- setahun perkapita, baru mencapai 75,78 persen kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dibutuhkan 24,22 persen sisanya untuk mencapai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa selama setahun terakhir Indeks PPP meningkat hanya sebesar 0,17 persen.

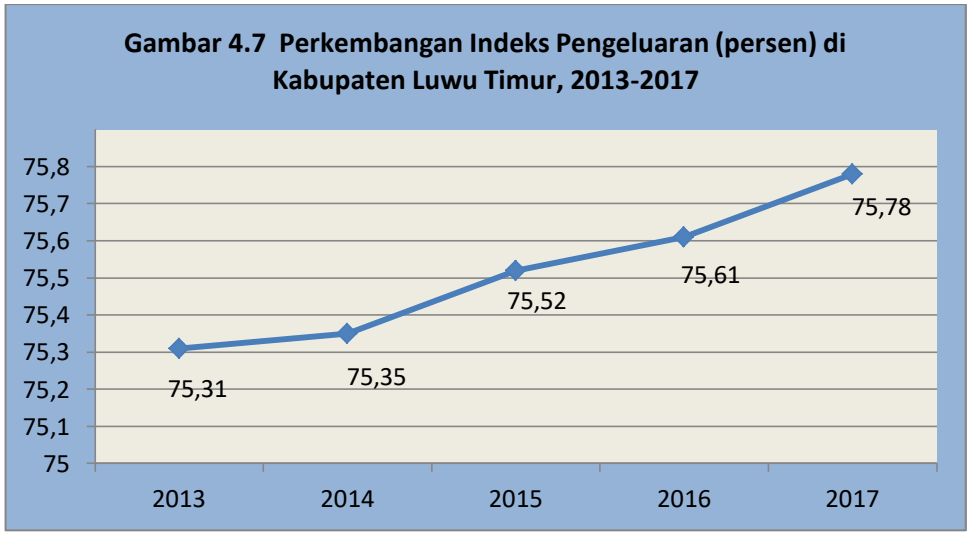

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Dari uraian di atas dan tabel 4.1, tampak adanya disparitas pencapaian ketiga indeks penyusun IPM Kabupaten Luwu Timur. Pencapaian kualitas manusia dari sisi kesehatan hingga tahun 2017 memiliki persentase terbesar dibanding dua dimensi lainnya (76,60 persen).

Namun selisihnya tidak beda jauh dengan indeks pengeluaran (75,78 persen). Sementara untuk indeks pendidikan, persentasenya jauh tertinggal. Hingga tahun 2017 baru mencapai angka 62,86 persen.

Disparitas ketiga dimensi tersebut menyebabkan pencapaian kualitas hidup manusia tidak terpaku pada satu dimensi yang tertinggi saja. Intervensi pemerintah sebaiknya diarahkan pada peningkatan ketiga dimensi tersebut secara simultan, dan utamakan untuk mendorong indeks yang terendah, yaitu pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang digunakan untuk mengukur dimensi pendidikan dibentuk dari kombinasi beberapa *variabel*, diantaranya yaitu : partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Artinya bahwa semakin banyak penduduk yang sekolah dan semakin tinggi jenjang pendidikan yang sedang dijalani atau yang telah ditamatkan, maka semakin meningkat pula nilai kedua indikator tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu juga perlunya membina kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Tidak hanya sebatas sudah melek huruf dan mampu mencari nafkah, lantas pendidikan formal dikesampingkan. Namun upaya menuju kualitas manusia yang lebih baik tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk berproses dan menampakkan hasil.

Tabel 4.1. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu TimurTahun 2013 - 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Angka Harapan Hidup (e_0)**	69,42	69,44	69,64	69,71	69,79
2.	**Harapan Lama Sekolah (EYS)**	11,79	11,95	12,36	12,78	12,79
3.	**Rata-rata Lama Sekolah (MYS)**	7,78	7,80	7,87	7,88	8,20
4.	**Paritas Daya Beli (ribu Rp/Kapita)**	11.844	11.859	11.926	11.960	12.030
5.	**Indeks Kesehatan**	76,03	76,06	76,36	76,48	76,60
6.	**Indeks Harapan Lama Sekolah**	65,51	66,41	68,69	71,00	71,06
7.	**Indeks Rata-Rata Lama Sekolah**	51,89	52,02	52,49	52,53	54,67
8.	**Indeks Pendidikan**	58,70	59,21	60,59	61,77	62,88
9.	**Indeks Pengeluaran**	75,31	75,35	75,52	75,61	75,78

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Perbandingan antar indikator komponen IPM seperti yang diuraikan sebelumnya merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan disatukan menjadi suatu indeks komposit, IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (*output* pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. Namun demikian, untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari nilainya, akan tetapi dapat juga dilihat berdasarkan pertumbuhanya. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satu tahun.

IPM Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan perkembangan yang positif selama kurun waktu tahun 2013-2017. Perkembangan angka IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kinerja pemerintah dari waktu ke waktu yang tercermin dari peningkatan komponen IPM yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita.

Gambar 4.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2017

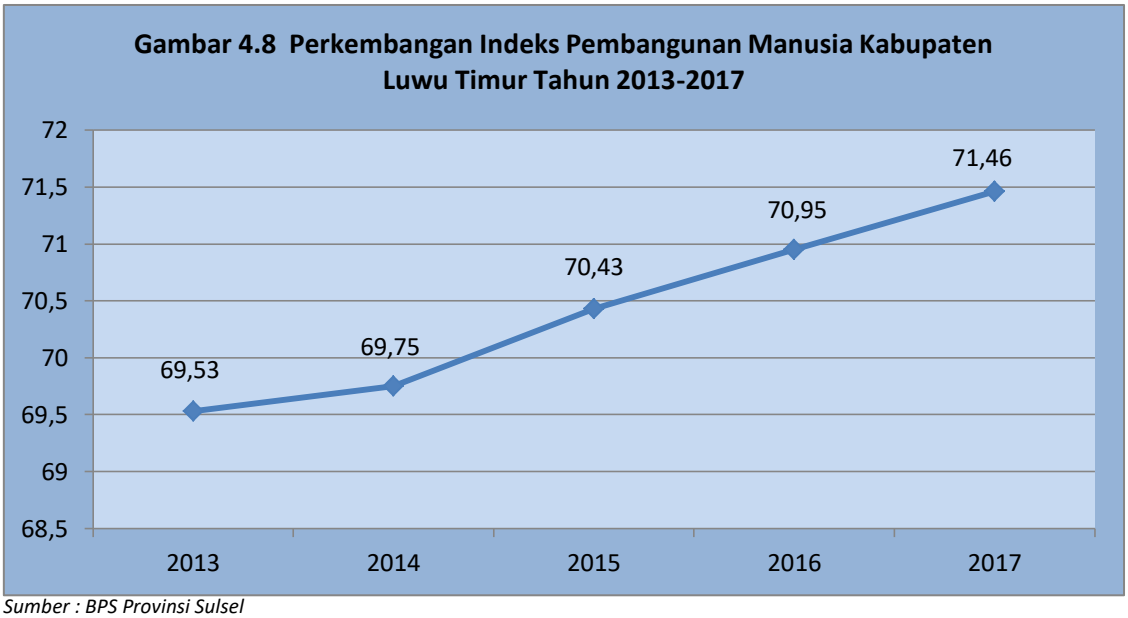

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Luwu Timur mencapai 71,46, meningkat 0,51 poin dibanding tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan 0,72 persen. Angka pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,74 persen. Dengan nilai IPM di

atas 70, berdasarkan klasifikasi UNDP, Kabupaten Luwu Timur telah mampu mencapai klasifikasi IPM tinggi (70 ≤ IPM < 80).

4.2 IPM Kabupaten/ kota se-Tana Luwu dan se Sulawesi Selatan

Tabel-tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan komponen-komponen IPM kabupaten/kota se-Tana Luwu dan se-Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Tana Luwu dalam kurun waktu 2013-2017, AHH Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan kedua setelah kota Palopo. Sementara bila dilihat rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Timur tidak terlalu jauh hanya selisih 0,05 atau semakin mendekati rata-rata provinsi.

Tabel 4.2 Angka Harapan Hidup Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 (tahun)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luwu	69,13	69,14	69,44	69,52	69,60
Luwu Utara	66,98	67,00	67,40	67,50	67,61
Luwu Timur	**69,42**	**69,44**	**69,64**	**69,71**	**69,79**
Palopo	70,10	70,12	70,20	70,25	70,30
Sulawesi Selatan	69,50	69,60	69,80	69,82	69,84

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Sementara untuk komponen Harapan Lama Sekolah, Kabupaten Luwu Timur menempati urutan kedua terbawah setelah Kabupaten Luwu Utara. Sampai tahun 2017, pencapaian Harapan Lama Sekolah kedua kabupaten tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Hanya Kota Palopo yang mampu mengungguli angka provinsi sementara Kabupaten Luwu angkanya sama dengan angka provinsi.

Tabel 4.3 Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 (tahun)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luwu	12,33	12,87	12,88	13,27	13,28
Luwu Utara	11,91	12,09	12,11	12,33	12,38
Luwu Timur	**11,79**	**11,95**	**12,36**	**12,78**	**12,79**
Palopo	14,49	15,01	15,02	15,03	15,05
Sulawesi Selatan	12,52	12,90	12,99	13,16	13,28

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Pencapaian rata-rata lama sekolah tahun 2013-2017 menempatkan Kabupaten Luwu Timur berada di posisi kedua di Tana Luwu setelah Kota Palopo. Angka tersebut juga lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di daerah ini sudah cukup berkembang dengan baik. Namun demikian masih diperlukan suatu upaya terencana dan berkesinambungan agar pembangunan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur dapat menuntaskan permasalahan pendidikan sekaligus mengejar target program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2013-2017 (tahun)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luwu	7,36	7,60	7,74	7,75	7,89
Luwu Utara	7,02	7,19	7,38	7,39	7,52
Luwu Timur	**7,78**	**7,80**	**7,87**	**7,88**	**8,20**
Palopo	9,95	9,96	10,25	10,26	10,33
Sulawesi Selatan	7,45	7,49	7,64	7,75	7,95

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Luwu Timur terus meningkat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Tana Luwu, kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat dua setelah Kota Palopo.

Tabel 4.5 Kemampuan Daya Beli Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2013-2017 (Ribu Rupiah/kapita/Tahun)

Kab/Kota/Prov	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luwu	8.687	8.764	9.160	9.301	9.381
Luwu Utara	10.541	10.605	10.697	10.786	11.101
Luwu Timur	**11.844**	**11.859**	**11.926**	**11.960**	**12.030**
Palopo	11.590	11.713	12.005	12.156	12.315
Sulawesi Selatan	9.632	9.723	9.992	10.281	10.489

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Dari uraian keempat komponen IPM dari masing-masing kabupaten/kota se-Tana Luwu di atas, diperoleh indeks komposit sebagaimana tersaji dalam tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 4.6. Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota se-Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2013-2017

Kab/Kota/Prov	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luwu	66,39	67,34	68,11	68,71	69,02
Luwu Utara	66,4	66,9	67,44	67,81	68,35
Luwu Timur	**69,53**	**69,75**	**70,43**	**70,95**	**71,46**
Palopo	75,02	75,65	76,27	76,45	76,71
SULAWESI SELATAN	67,26	67,92	69,15	69,76	70,34

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Sebagaimana uraian masing-masing komponen penyusunnya, maka untuk indeks komposit yang dihasilkan terlihat pada gambar di atas. Kota Palopo berada pada posisi teratas dengan jarak yang cukup jauh dari Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu dan Luwu Utara masih berada dibawahnya sementara Kabupaten Luwu Timur berada di atasnya dengan selisih 1,12 poin (2017).

Gambar 4.9 Perkembangan IPM Kab/Kota se- Tana Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2017

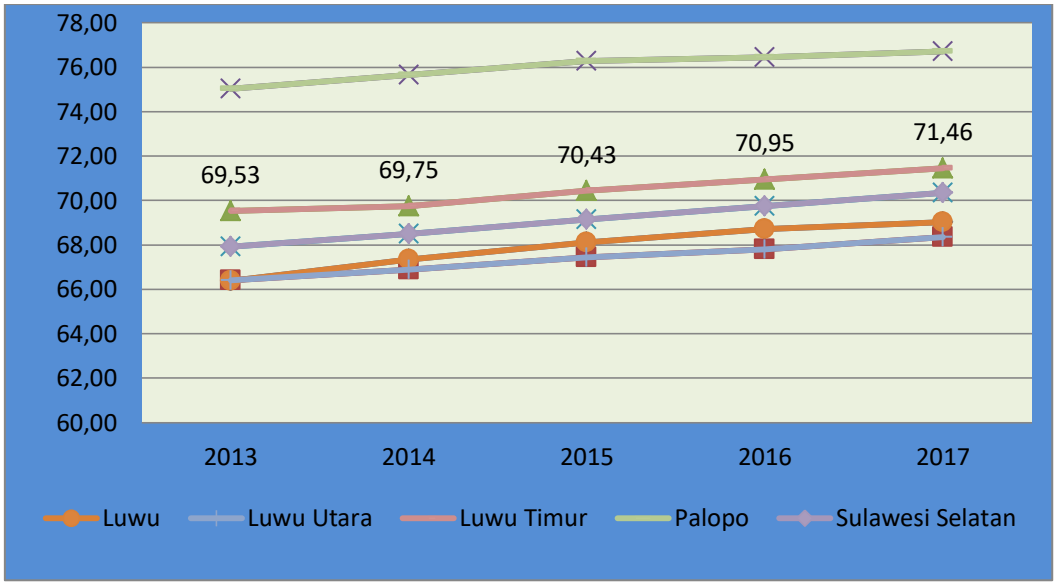

Sumber:IPM, Prov Sulawesi Selatan

Ketika di Tana Luwu IPM Kabupaten Luwu Timur menempati posisi kedua, maka dari tabel 4.7 diketahui bahwa saat dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-4. Posisi pertama masih sama dengan tahun sebelumnya adalah Kota Makassar (81,13) dan posisi terakhir adalah Kabupaten Jeneponto (62,67). Sementara kabupaten/kota lain mengalami pergeseran yang bervariasi.

Tabel 4.7 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH	HLS	RLS	Pengeluaran	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SULAWESI SELATAN	69,84	13,28	7,95	10.489	70,34	14
Selayar	67,82	12,45	7,18	8.436	65,39	22
Bulukumba	66,96	12,65	7,16	10.217	67,08	17
Bantaeng	69,90	11,99	6,45	10.751	67,27	15
Jeneponto	65,65	11,93	5,98	8.747	62,67	24
Takalar	66,38	12,21	6,77	9.845	65,48	21
Gowa	69,95	13,04	7,74	9.009	68,33	12
Sinjai	66,61	12,84	7,28	8.816	65,80	20
Maros	68,60	12,97	7,42	10.121	68,42	10
Pangkajene Kepulauan	65,86	12,40	7,48	10.837	67,25	16
Barru	68,30	13,55	7,85	10.285	69,56	8
Bone	66,22	12,43	6,77	8.470	64,16	23
Soppeng	68,72	12,33	7,42	9.035	66,67	19
Wajo	66,52	13,09	6,78	11.770	68,18	13
Sidenreng Rappang	68,82	12,90	7,52	11.523	69,84	7
Pinrang	68,68	13,19	7,54	11.279	69,90	6
Enrekang	70,38	13,66	8,43	10.359	71,44	5
Luwu	69,60	13,28	7,89	9.381	69,02	9
Tana Toraja	72,56	13,25	7,93	6.801	66,82	18
Luwu Utara	67,61	12,38	7,52	11.101	68,35	11
Luwu Timur	69,79	12,79	8,20	12.030	71,46	4
Toraja Utara	72,94	13,34	7,73	7.457	67,90	14
Kota Makasar	71,51	15,18	11,08	16.367	81,13	1
Kota Pare Pare	70,69	14,46	10,09	13.078	76,68	3
Kota Palopo	70,30	15,05	10,33	12.319	76,71	2

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Berdasarkan klasifikasi UNDP, hampir semua kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong tingkat pembangunan manusia menengah (60 ≤ IPM < 70). Hanya Kabupaten Luwu Timur dan Enrekang saja yang telah mampu mencapai klasifikasi IPM tinggi

(70 ≤ IPM < 80), sebagaimana ketiga kota di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Pare pare dan Palopo.

Hal lain yang perlu diungkapkan dari perkembangan IPM adalah terdapat beberapa Kabupaten/kota yang mengalami kemajuan cukup pesat selama 2016-2017. Kemajuan ini terlihat dari angka pertumbuhan aritmatik yang telah dicapai oleh kabupaten/kota.

Tabel 4.8 IPM Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2017 (persen)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2016	2017	Pertumbuhan IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Selayar	64,95	65,39	0,68
2	Bulukumba	66,46	67,08	0,93
3	Bantaeng	66,59	67,27	1,02
4	Jeneponto	61,81	62,67	1,39
5	Takalar	64,96	65,48	0,80
6	Gowa	67,70	68,33	0,93
7	Sinjai	65,36	65,80	0,67
8	Maros	67,76	68,42	0,97
9	Pangkajene Kepulauan	66,86	67,25	0,58
10	Barru	69,07	69,56	0,71
11	Bone	63,86	64,16	0,47
12	Soppeng	65,95	66,67	1,09
13	Wajo	67,52	68,18	0,98
14	Sidenreng Rappang	69,39	69,84	0,65
15	Pinrang	69,42	69,90	0,69
16	Enrekang	70,79	71,44	0,92
17	Luwu	68,71	69,02	0,45
18	Tana Toraja	66,25	66,82	0,86
19	Luwu Utara	67,81	68,35	0,80
20	Luwu Timur	70,95	71,46	0,72
21	Toraja Utara	67,49	67,90	0,61
22	Kota Makasar	80,53	81,13	0,75
23	Kota Pare Pare	76,48	76,68	0,26
24	Kota Palopo	76,45	76,71	0,34

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Pada tabel 4.8, terlihat bahwa Kabupaten Jeneponto melaju paling cepat dengan pertumbuhan 1,39 persen. Diikuti oleh Kabupaten Soppeng dan Bantaeng masing-masing tumbuh 1,09 dan 1,02 persen. Sementara Kabupaten Luwu Timur pada periode yang sama hanya tumbuh 0,72 persen. Hal menarik pada data diatas dimana Jeneponto yang menempati

peringkat terakhir tetapi justru pertumbuhannya yang paling tinggi. Ini berarti bahwa semua kabupaten/kota terus berpacu dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Bila Kabupaten Luwu Timur tidak berusaha meningkatkan atau minimal mempertahankan pertumbuhan IPM nya, maka kemungkinan besar posisinya pada peringkat 4 saat ini akan tergeser oleh kabupaten lain. Sebaliknya, bila Kabupaten Luwu Timur mampu memacu lebih cepat pembangunan kualitas hidup masyarakatnya, maka dapat memperkecil ketertinggalan dari peringkat di atasnya, atau bahkan suatu saat bergeser ke atas menjadi peringkat 3. Namun semua itu tentu membutuhkan usaha keras dan proses yang tidak singkat.

Pada gambar 4.10, tersaji masing-masing indeks dimensi yang membentuk IPM setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Nampak bahwa permasalahan rendahnya dimensi pendidikan tidak hanya dialami oleh Kabupaten Luwu Timur saja tetapi juga oleh sebagian besar kabupaten/kota lainnya. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap pembangunan kualitas pendidikan tanpa mengesampingkan pencapaian hidup sehat dan panjang umur, serta standar hidup layak bagi masyarakatnya.

Gambar 4.10 IPM dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan Tahun 2017

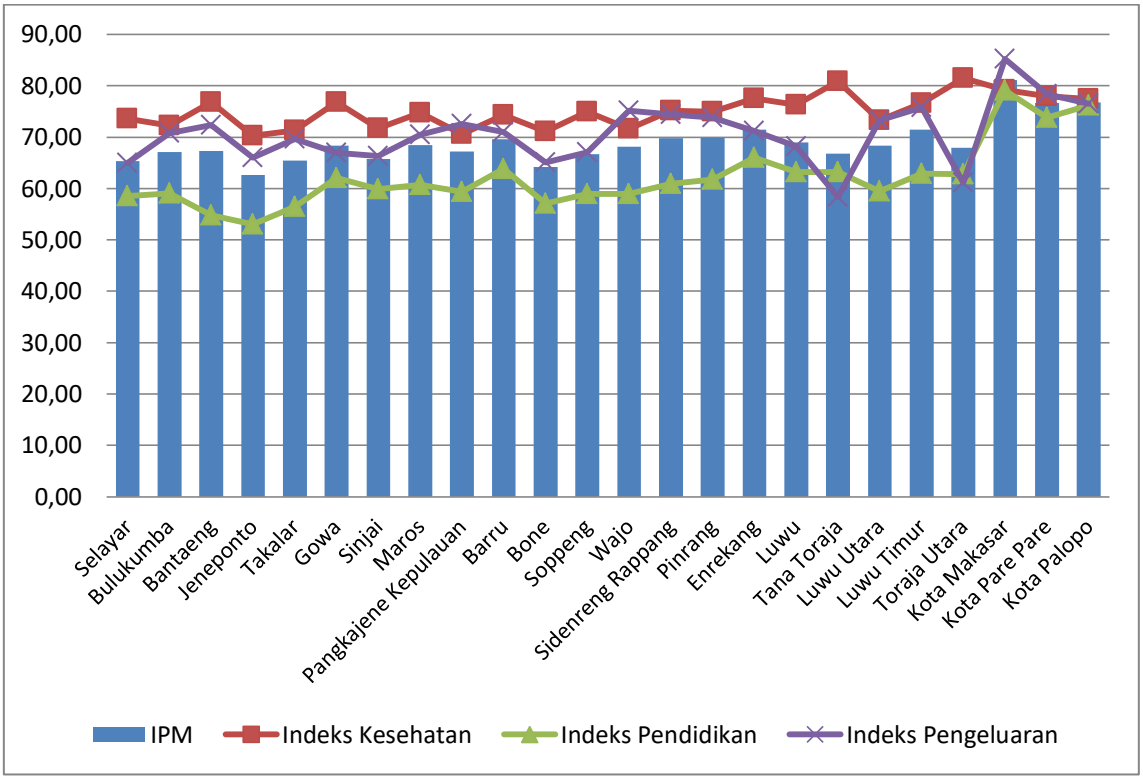

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR